



EFFECTIVENESS OF THE DPRD RECESS PROGRAM IN ABSORBING PUBLIC ASPIRATIONS

Suryaningsih^{1*}, Muhammad Husein Maruapey^a, Denny Hernawan^a

^aUniversitas Djuanda, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 27-08-2025

Revisi pertama tanggal: 08-09-2025

Diterima tanggal: 30-09-2025

Tersedia *online* tanggal: 20-10-2025

Keywords: Public Aspirations, Program Effectiveness, Public Participation, DPRD Recess

ABSTRACT

The recess activities of members of the Regional People's Representative Council (DPRD) are an official and strategic agenda designed to bridge communication between the legislative branch and the public. The goal is to ensure that public aspirations, needs, and issues are effectively absorbed and become the basis for policy. This study aims to analyze the effectiveness of recess in absorbing aspirations by focusing on three key indicators: the level of public participation, the alignment of aspirations with real needs, and the realization of follow-up on the aspirations expressed. This study uses a descriptive qualitative method to obtain an in-depth and comprehensive picture. Data collection was conducted through in-depth interviews and field observations. The collected data were analyzed thematically to identify patterns, key issues, and relevant conclusions. Research informants were selected purposively to represent a variety of perspectives, including council members who directly implemented the recess, council personal assistants who documented and facilitated the process, community leaders who served as representatives and liaisons at the community level, and the general public who directly participated in the recess activities. The research results show that recess does provide ample space for public participation, particularly in conveying aspirations regarding social assistance and infrastructure development. However, its effectiveness still faces significant obstacles. The main obstacles include unequal regional distribution, where not all areas receive equal attention; limited socialization of activities, leaving many people unaware of the recess schedule; and often slow or unclear follow-up. The novelty of this research lies in its analysis, which not only identifies the problems but also links the effectiveness of recess to three key interconnected factors: public participation, multi-channel communication, and a monitoring system. This research emphasizes that the success of recess depends not only on face-to-face meetings but also on how aspirations are systematically followed up. Based on these findings, the research recommends the need for data-driven evaluation to ensure a more equitable and transparent process and to improve equity in the distribution of benefits resulting from community aspirations.

ABSTRAK

Reses Anggota DPRD: Analisis Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan agenda resmi dan strategis yang dirancang sebagai jembatan komunikasi antara pihak legislatif dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aspirasi, kebutuhan, dan masalah publik dapat terserap secara efektif dan menjadi dasar kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas reses dalam penyerapan aspirasi dengan berfokus pada tiga indikator kunci: tingkat partisipasi masyarakat, kesesuaian aspirasi dengan kebutuhan riil, dan realisasi tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran mendalam dan komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, isu-isu utama, dan kesimpulan yang relevan. Informan penelitian dipilih secara purposif untuk mewakili berbagai perspektif, antara lain anggota dewan yang secara langsung melaksanakan reses, asisten pribadi dewan yang bertugas mendokumentasikan dan memfasilitasi proses, tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan dan penghubung di tingkat komunitas, serta masyarakat umum yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan reses. Hasil penelitian

^{1*} Corresponding author. Suryaningsih; e-mail: suryaningsihputri594@gmail.com

menunjukkan bahwa reses memang memberikan ruang partisipasi yang cukup luas bagi masyarakat, terutama dalam menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Hambatan utama mencakup distribusi wilayah yang timpang, di mana tidak semua daerah mendapatkan perhatian yang setara, sosialisasi kegiatan yang terbatas, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui jadwal reses, serta tindak lanjut yang seringkali lambat atau tidak jelas. Kebaruan (novelti) penelitian ini terletak pada analisis yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mengaitkan efektivitas reses dengan tiga faktor kunci yang saling berhubungan: partisipasi publik, komunikasi multikanal, dan sistem monitoring. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan reses tidak hanya bergantung pada pertemuan tatap muka, tetapi juga pada bagaimana aspirasi ditindaklanjuti secara sistematis. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan perlunya evaluasi berbasis data untuk memastikan proses yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan keadilan dalam distribusi manfaat yang dihasilkan dari aspirasi masyarakat.

1. Pendahuluan

Demokrasi modern, khususnya di tingkat lokal, menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan. DPRD tidak sekadar menjadi mitra pemerintah daerah, melainkan juga berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Fungsi pengawasan DPRD, seperti yang dianalisis oleh Hutabarat dan Banjarnahor (2025), kini memiliki peluang yang lebih luas untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Peran utamanya meliputi fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), fungsi penganggaran (menetapkan anggaran daerah), dan fungsi pengawasan (mengawasi jalannya pemerintahan). Ketiga fungsi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan peran ini sangat bergantung pada seberapa efektif DPRD dapat menyerap dan mengartikulasikan aspirasi publik. Tanpa mekanisme yang kuat untuk menangkap suara rakyat, fungsi-fungsi tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas, jauh dari esensi representasi.

Salah satu instrumen kunci yang digunakan oleh DPRD untuk menjembatani kesenjangan antara wakil rakyat dan konstituen adalah kegiatan reses. Reses merupakan masa di luar masa sidang yang secara khusus dialokasikan bagi anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihannya. Tujuan utamanya sangat mulia: menjaring aspirasi,

keluhan, dan masukan dari masyarakat secara tatap muka. Melalui reses, anggota dewan diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah riil yang dihadapi oleh konstituen mereka, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan publik, hingga isu-isu sosial. Aspirasi yang terkumpul kemudian akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran daerah.

Meski demikian, efektivitas pelaksanaan reses kerap menjadi subjek perdebatan. Berbagai penelitian sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun regional, menunjukkan adanya disparitas antara harapan dan realitas di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ubayd Dilla dengan judul Efektivitas Program Reses DPRD Medan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Medan Labuhan, misalnya, menemukan bahwa reses seringkali tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang hadir seringkali terbatas, hanya diisi oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara suara dari kelompok yang lebih luas dan beragam tidak terwakili. Selain itu, ada juga fenomena di mana aspirasi yang disampaikan bersifat seragam, sebatas permintaan bantuan fisik atau sosial, tanpa menyentuh persoalan struktural yang lebih kompleks. Penelitian lain juga menyoroti masalah birokrasi dan tindak lanjut yang lambat, di mana aspirasi yang sudah dicatat tidak serta-merta ditransformasikan menjadi program atau kebijakan yang konkret. Hal ini menciptakan siklus di mana masyarakat merasa aspirasi mereka tidak bisa

didengar dengan efektif, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

Permasalahan yang terjadi di tingkat nasional juga terefleksi dalam konteks lokal, termasuk di Kota Bogor. Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota, Kota Bogor menghadapi tantangan pembangunan yang dinamis, mulai dari kepadatan penduduk, infrastruktur yang menua, hingga isu lingkungan. Dalam konteks penganggaran daerah, Hardi dan Mulyana (2021) berpendapat bahwa reses memainkan peran penting sebagai jembatan untuk memastikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur, terakomodasi dengan baik dalam rencana anggaran. Dalam konteks ini, program reses menjadi instrumen yang sangat strategis bagi DPRD Kota Bogor, khususnya bagi Komisi III yang memiliki domain spesifik terkait pembangunan dan infrastruktur. Tugas Komisi III adalah mendengarkan kebutuhan masyarakat terkait fasilitas umum, lingkungan hidup, dan perencanaan wilayah. Namun, pelaksanaan reses oleh Komisi III di lapangan, khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Barat, tidak luput dari kendala-kendala yang mereduksi efektivitasnya.

Fenomena yang diamati di lapangan menunjukkan beberapa masalah krusial. Pertama, partisipasi masyarakat yang rendah masih menjadi tantangan. Reses seringkali hanya dihadiri oleh segelintir tokoh masyarakat atau perwakilan kelompok yang sudah akrab dengan anggota dewan, bukan perwakilan yang benar-benar merefleksikan keragaman populasi di Kecamatan Bogor Barat. Kedua, adanya miskomunikasi atau bahkan ketidakselarasan antara aspirasi reses dengan program Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Masyarakat menyampaikan aspirasi melalui reses, tetapi usulan yang sama seringkali juga diajukan melalui mekanisme Musrenbang. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan duplikasi atau bahkan tumpang tindih usulan, yang pada akhirnya memperlambat proses realisasi dan menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat. Ketiga, pemanfaatan sistem digital dalam penginputan aspirasi belum optimal. Catatan aspirasi seringkali masih bersifat manual atau terdistribusi di berbagai media, mempersulit proses konsolidasi dan

monitoring tindak lanjut. Akibatnya, sulit untuk melacak apakah sebuah aspirasi telah dicatat, diperjuangkan, atau direalisasikan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, urgensi penelitian ini menjadi sangat jelas. Kesenjangan antara harapan dan realitas pelaksanaan reses tidak hanya sekadar isu teknis, tetapi memiliki implikasi serius terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Ketika aspirasi masyarakat tidak terserap dengan baik, program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah berisiko tidak tepat sasaran, tidak menjawab kebutuhan riil, dan bahkan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Yang lebih penting lagi, kegagalan ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, yang merupakan fondasi fundamental dari sebuah negara.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah (research gap) yang ada. Meskipun banyak studi telah mengkaji reses secara umum, masih sedikit yang secara spesifik menganalisis efektivitasnya dalam konteks Komisi III DPRD Kota Bogor. Penelitian ini akan menguraikan lebih dalam bagaimana faktor-faktor seperti partisipasi, koordinasi dengan Musrenbang, dan pemanfaatan teknologi secara khusus memengaruhi keberhasilan reses di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi literatur ilmu politik dan administrasi publik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi yang dapat digunakan oleh DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas kinerja dan efisiensi dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas program reses yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Bogor dalam menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Bogor Barat.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program reses tersebut, termasuk isu partisipasi, koordinasi dengan

Musrenbang, dan pemanfaatan sistem digital.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika reses di tingkat lokal, sehingga dapat memberikan panduan yang konkret untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel di masa mendatang.

2. Teori

Kerangka berpikir penelitian ini disusun secara sistematis dari atas ke bawah dengan menjadikan kerangka teori sebagai alat analisis. Peneliti menggunakan indikator efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani dalam Khadifi dan Mutiarin (2017), yang meliputi empat komponen utama, yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program

Menilai sejauh mana program reses menyoal kelompok masyarakat yang relevan dan benar-benar membutuhkan.

2. Sosialisasi Program

Mengukur efektivitas penyampaian informasi mengenai program kepada masyarakat sehingga partisipasi dapat berjalan optimal.

3. Tujuan Program

Memastikan bahwa tujuan kegiatan reses sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

4. Pemantauan Program

Mengkaji adanya mekanisme evaluasi atau pengawasan terhadap pelaksanaan dan hasil dari program reses.

Keempat indikator tersebut berfungsi sebagai variabel antara yang menghubungkan permasalahan dengan solusi dalam penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih secara khusus untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi serta fenomena sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan program reses oleh Komisi III DPRD Kota Bogor. Menurut Creswell dan Creswell (2022), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan

untuk memahami secara mendalam suatu peristiwa atau situasi berdasarkan perspektif partisipan yang terlibat langsung. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengurai kompleksitas interaksi antara anggota dewan, staf, dan masyarakat dalam proses penyerapan aspirasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi dua metode utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dengan pelaksanaan program reses. Informan tersebut mencakup anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, asisten pribadi dewan yang memfasilitasi kegiatan, tokoh masyarakat di Kecamatan Bogor Barat yang menjadi perwakilan konstituen, dan masyarakat umum yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan reses. Wawancara ini digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses penyerapan aspirasi. Kedua, observasi partisipatif dilakukan pada beberapa kegiatan reses untuk mendapatkan data kontekstual yang mendukung temuan dari wawancara. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi, suasana pertemuan, serta kondisi faktual di lapangan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan dalam penyerapan aspirasi masyarakat, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program reses secara komprehensif. Melalui tahapan ini, data-data mentah dari wawancara dan observasi akan diorganisir, dikategorikan berdasarkan tema-tema relevan seperti partisipasi, komunikasi, dan tindak lanjut, hingga akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Reses merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang dirancang untuk menghubungkan secara langsung antara legislatif dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, anggota dewan memperoleh kesempatan untuk mendengarkan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dan membangun komunikasi yang lebih

intensif dengan konstituen. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan difokuskan pada empat indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas program reses, yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

1. ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran merupakan aspek krusial dalam menghindari pemborosan anggaran publik dan memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya survei dan dialog awal oleh anggota DPRD berkontribusi positif terhadap akurasi dalam penentuan sasaran. Hal ini mengindikasikan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based planning*) yang sejalan dengan teori perencanaan deliberatif yang dikemukakan oleh Healey (1997), di mana keterlibatan warga dalam proses perencanaan meningkatkan relevansi dan legitimasi keputusan publik.

Namun demikian, munculnya bias politik dalam penentuan lokasi reses mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga objektivitas dan prinsip keadilan distributif. Temuan ini memperkuat studi dari Sari dan Nugroho (2021), yang menegaskan bahwa keterkaitan politik sering memengaruhi alokasi sumber daya, khususnya dalam konteks politik elektoral. Dalam konteks demokrasi perwakilan, situasi ini mencerminkan tensi antara kepentingan elektoral dan etika pelayanan publik, yang menjadi diskursus penting dalam kajian *governance*.

Ke depan, penguatan transparansi dalam penentuan wilayah reses dan penggunaan indikator objektif seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan infrastruktur dasar, dan keterisolasian wilayah dapat memperbaiki ketepatan sasaran. Hal ini didukung oleh pendekatan kebijakan berbasis kebutuhan (*need-based policy*), yang menurut Stone (2012), menjadi fondasi dari kebijakan publik yang adil dan inklusif.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan bagian dari strategi komunikasi publik yang vital dalam membangun hubungan timbal balik antara penyelenggara program dan masyarakat. Pendekatan multi-kanal yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan

adaptasi terhadap realitas sosial yang semakin kompleks, di mana masyarakat mengakses informasi dari berbagai sumber. Temuan ini mengafirmasi pendapat Lasswell (1948) tentang pentingnya siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa (model komunikasi 5W).

Namun, ketimpangan dalam penggunaan kanal formal dan informal masih menjadi tantangan. Temuan ini sejalan dengan studi Putri dan Hidayat (2021), yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada saluran informal menyebabkan asimetri informasi, terutama bagi kelompok yang tidak aktif secara sosial, seperti warga lansia, perempuan di wilayah terpencil, atau penyandang disabilitas.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, ketimpangan sosialisasi ini dapat menghambat partisipasi yang setara. Habermas (1991) menekankan pentingnya akses universal terhadap informasi sebagai syarat deliberasi yang inklusif. Oleh karena itu, integrasi media komunikasi formal (situs web, papan pengumuman, buletin) dan informal perlu diprioritaskan, serta disesuaikan dengan karakteristik sosial-demografis masyarakat setempat.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas media komunikasi juga penting dilakukan agar DPRD tidak hanya menginformasikan, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui peningkatan literasi politik dan akses informasi.

3. Pencapaian Tujuan program

Indikator pencapaian tujuan program menempatkan fokus pada kinerja substantif, yaitu keterwujudan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reses relatif sesuai dengan rencana dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Penelitian oleh Munthe (2023) menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan reses dapat dinilai baik, terbukti dengan banyaknya warga yang aktif menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan. Hal ini mencerminkan adanya upaya serius dalam manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*), yang menurut Kusek & Rist (2004), merupakan kerangka kerja penting dalam pengelolaan program publik yang efektif. Studi oleh Gazali et al. (2025) mencatat bahwa meskipun antusiasme masyarakat tinggi, kendala dalam komunikasi politik dan umpan balik menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan reses.

Namun, tantangan besar terletak pada ketimpangan realisasi antarwilayah dan keterlambatan tindak lanjut. Masalah ini tidak hanya bersifat teknis (birokrasi dan anggaran), tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam mekanisme prioritas dan koordinasi antar-stakeholder. Dalam teori implementasi kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, sumber daya, dan komunikasi antar-pelaksana.

Kesenjangan antara pengumpulan aspirasi dan realisasi juga berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Hal ini senada dengan hasil penelitian oleh Wicaksono dan Darmawan (2022), yang menemukan bahwa keterlambatan implementasi kebijakan daerah menurunkan kepuasan warga terhadap wakil rakyat dan melemahkan legitimasi politik mereka.

Oleh karena itu, reformasi dalam aspek perencanaan anggaran, koordinasi lintas OPD (organisasi perangkat daerah), serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program reses.

4. Pemantauan Program

Pemantauan atau monitoring program merupakan fondasi dari siklus evaluasi kebijakan publik yang menyeluruh. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah ada upaya aktif dari anggota DPRD dalam melakukan monitoring berbasis kegiatan lapangan dan komunikasi dengan warga. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi representasi yang bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip akuntabilitas demokratis (*democratic accountability*) yang dikemukakan oleh Bovens (2007).

Namun, tidak adanya indikator terukur, laporan periodik, atau matriks kinerja yang dapat diakses publik menandakan bahwa proses monitoring masih berada dalam tahap informal dan bersifat deskriptif. Temuan ini diperkuat oleh Rahmawati dan Prasetyo (2022), yang menilai bahwa ketiadaan indikator objektif menyebabkan evaluasi program cenderung menjadi normatif dan tidak mampu mendeteksi penyimpangan secara sistematis.

Dalam konteks evaluasi kebijakan, Patton (2008) menekankan pentingnya penggunaan evaluasi formatif dan sumatif untuk memahami

proses dan dampak program secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi manajemen aspirasi berbasis indikator kuantitatif (misalnya: jumlah usulan, tingkat realisasi, waktu tunggu) dan kualitatif (tingkat kepuasan masyarakat) sangat direkomendasikan.

Transparansi dalam pemantauan juga dapat ditingkatkan melalui pelibatan masyarakat sipil dan media dalam proses evaluasi. Dengan begitu, pengawasan terhadap kinerja DPRD tidak hanya bersifat internal, tetapi juga partisipatif dan memperkuat demokrasi substantif. Studi Aji et al. (2023) menekankan peran interaktivitas pada media sosial pemerintah sebagai pendorong layanan publik yang lebih baik, di mana warga menjadi lebih berdaya dalam menentukan agenda lokal.

Diskursus atas keempat indikator efektivitas program reses menunjukkan bahwa meskipun telah ada inisiatif positif dalam pelaksanaan reses, masih terdapat tantangan konseptual dan teknis yang memengaruhi optimalisasi fungsi representasi legislatif. Ketepatan sasaran masih dipengaruhi oleh kalkulasi politik, sosialisasi belum sepenuhnya merata, pencapaian tujuan belum inklusif, dan pemantauan belum berbasis data terukur.

Diskursus ini memperkuat pentingnya pendekatan holistik dan integratif dalam manajemen program reses, yang menggabungkan prinsip-prinsip *good governance*, evaluasi berbasis data, serta partisipasi publik yang sejati.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program reses DPRD Komisi III Kota Bogor di wilayah Bogor Barat telah berkontribusi positif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan yang umumnya tepat waktu, relevan dengan kebutuhan lokal, dan memanfaatkan strategi sosialisasi multi-kanal. Ketepatan sasaran program tercermin dari adanya survei lapangan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, meskipun distribusi wilayah sasaran belum sepenuhnya merata karena kecenderungan prioritas pada daerah dengan kedekatan politik.

Sosialisasi yang mengandalkan pertemuan tatap muka, koordinasi RT/RW, dan media sosial efektif mendorong partisipasi publik, tetapi jalur formal seperti publikasi resmi belum dioptimalkan sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi.

Pencapaian tujuan program telah mengakomodasi kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, dan layanan kesehatan, namun proses realisasi aspirasi masih memerlukan waktu lama dan belum dirasakan merata di seluruh dapil. Pemantauan program menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas melalui pencatatan aspirasi, komunikasi rutin, dan kunjungan lapangan, namun belum tersedia evaluasi berbasis indikator terukur yang memungkinkan pengukuran capaian secara obyektif.

Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan pada pemerataan manfaat, percepatan tindak lanjut aspirasi, optimalisasi kanal sosialisasi formal, serta penerapan sistem monitoring berbasis data untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan teoretis bagi kajian komunikasi politik dan partisipasi publik, serta memberi masukan praktis dan kebijakan bagi DPRD untuk mengintegrasikan teknologi informasi, memperluas pemerataan wilayah sasaran, dan menetapkan regulasi internal yang menjamin keterbukaan informasi serta pemerataan manfaat program.

Daftar Pustaka

- Aisy, D. S., Purnamasari, I., Apriliani, A., Seran, G. G., Pratidina, G., Maruapey, M. H., ... & Mulyono, I. E. (2024). Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang pengelolaan badan usaha milik desa. *Jurnal Governansi*, 10(2), 243–252.
- Aji, F. N. (2023). Interactivity on government social media to improve public services. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 88–101.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Public Accountability*. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dilla, Ibnu Ubayd, M. Arif Nasution, and Agus Suriadi. "Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 6.4 (2020).
- Edwards, J. L., & Winkler, C. K. (2020). *Representative democracy and public policy*. Routledge.
- Gazali, F. N., et al. (2025). Efektivitas kebijakan pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *WISSEN*, 3(1).
- Hardi, I. & Mulyana, E. (2021). Peran reses DPRD dalam penyusunan anggaran daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Daerah*, 8(2), 150-165.
- Hutabarat, C. L., & Banjarnahor, D. N. (2025). Analisis fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam UUD sebelum reformasi dan UUD sesudah reformasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3203–3214.
- Husein, M., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2024). Efektivitas kebijakan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui reses. *Karimah Tauhid*, 3(1), 539–548.
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas program bantuan keuangan khusus dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 334–335.
- Munthe, K. D. (2023). Efektivitas reses DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 2(1), 45-58.
- Miller, K. (2021). *Organizational communication: Approaches and processes* (8th ed.). Cengage Learning.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pratidina, G., & Munjin, R. A. (2024). Efektivitas pembangunan pemeliharaan infrastruktur irigasi kelas A wilayah III. *Karimah Tauhid*, 3(1), 452–464.

- Putri, R., & Hidayat, R. (2021). Strategi komunikasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan, 19*(2), 145–156.
- Rahmawati, S., & Prasetyo, A. (2022). Evaluasi program pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik, 14*(1), 55–68.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Distribusi bantuan sosial pasca-pandemi: Analisis pemerataan dan efektivitas. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(3), 233–248.
- Stone, D. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.
- Wicaksono, H., & Darmawan, S. (2022). "Keterlambatan implementasi kebijakan daerah dan dampaknya terhadap kepercayaan publik." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 21*(1), 45–60.